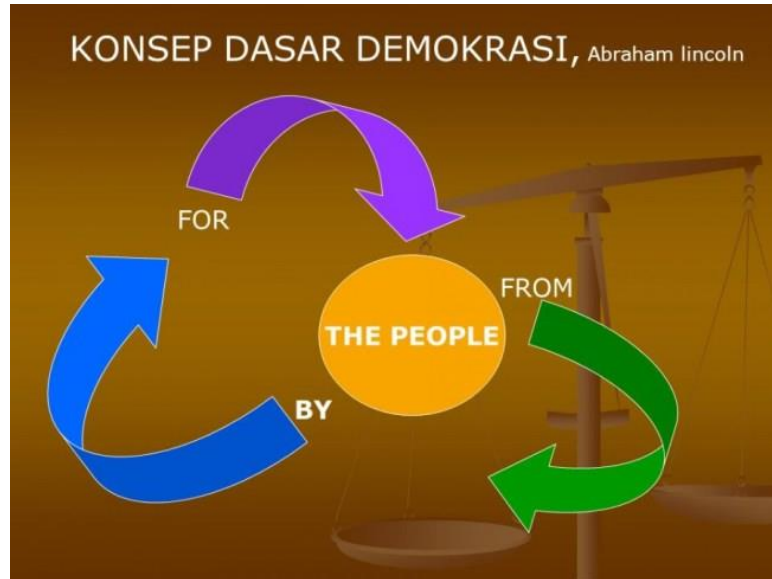


MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN XI

DEMOKRASI DI INDONESIA

1. DEFINISI

- a. Etimologis: Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan cratos atau cretain berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demos cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat
- b. Terminologis: Banyak pandangan tentang demokrasi antara lain dapat dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan, sistem politik, dan pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya
- c. Pengertian Demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”
- d. Jadi ketahanan nasional sebagai ketangguhan, kekuatan, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak kenal menyerah diri suatu bangsa
- e. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional sesuai dengan nilai dan norma UUD 1945. Bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak dasar warga negara
- f. Dalam arti luas demokrasi pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang didalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai pancasila
- g. Dalam arti sempit demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan
- h. Pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat Charles Costello merupakan suatu sistem sosial dan juga politik pemerintahan dimana di dalamnya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warna Negara itu sendiri
- i. Sementara pengertian dari demokrasi berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Adapun mengenai pelaksana kekuasaan Negara sendiri adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh perhatian di dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan Negara.



Gambar 1
Konsep Dasar Demokrasi

2. PENGAKUAN RESMI BAHWA INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRASI

- a. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- b. Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

3. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

- a. Bahasa Nasional, bahasa pemersatu Bahasa Indonesia
- b. Bendera negara: Merah Putih
- c. Lambang negara: Pancasila
- d. Dasar falsafah negara: Pancasila
- e. Kebudayaan Daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan Nasional
- f. Lagu kebangsaan: Indonesia Raya
- g. Konstitusi (Hukum dasar): UUD 1945
- h. Semboyan negara: Bhineka Tunggal Ika
- i. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- j. Konsepsi wawasan nusantara

4. SEPULUH PILAR DEMOKRASI DI INDONESIA

- a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa: Esensinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat azas,

konsisten atau sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa

- b. Demokrasi dengan kecerdasan: Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa semata. Justru lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
- k. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat: Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memegang/memiliki kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat MPE (dpr/DPD) dan DPRD
- l. Demokrasi dengan *rule of law*: Kekuasaan negara RI berdasarkan hukum kontitusi
- m. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan: UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kekuasaan (demokrasi)
- n. Demokrasi dengan HAM: Meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya
- o. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka: Menghendaki peradilan yang independent agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya
- p. Demokrasi dengan otonomi daerah: Adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah yang berimbang
- q. Demokrasi dengan kemakmuran: Ditujukan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya
- r. Demokrasi yang berkeadilan: Demokrasi menggariskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5. HISTORIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. Sumber dari demokrasi desa, tradisi kolektif dari permusyawatan desa. Sejak abad XIV dan XV di desa-desa Minangkabau sudah menerapkan demokrasi dengan alur (logika) dan patut (keadilan) dalam mempertimbangkan keputusan raja
- b. Sumber dari Islam, ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai mahluk Tuhan.
- c. Sumber dari Barat, paham sosialis barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan, karena dasar-dasar perikemanusiaan

6. SOSIOLOGIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) demokrasi konstitusional menonjolkan peran parlemen dan partai-partai, disebut demokrasi parlememter

- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) demokrasi Terpimpin. Penyimpangan demokrasi konstitusional
- c. Masa Republik Indonesia III (1959-1998) demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional menonjolkan sistem presidensial
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) masa reformasi, menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik pada masa Republik Indonesia III

7. POLITIS DEMOKRASI INDONESIA

- a. Kesempatan berpartisipasi, kesamaan di muka hukum, distribusi pendapatan yang adil dan layak
- b. Pelaksanaan demokrasi dalam Pemilu Kada, DPR, DPD dan DPRD

8. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

a. Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950—1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Dampaknya, yaitu:

1. Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.
2. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai.
3. Dalam sistem multi partai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat.
4. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah (DII/TII, Permesta, APRA, RMS).
5. Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu.

Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950.

b. Demokrasi Terpimpin (1959—1966)

Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial (presidensiil). Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

c. Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yaitu:

1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

9. PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI

Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Pengakuan akan supremasi hukum (kedaulatan hukum)
3. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

6. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
7. HAM dijamin
8. Kebebasan pers
9. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil

Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif, sebagai berikut:

1. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi
2. Mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat
3. Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi
4. Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya
5. Tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat
6. Menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif

10. MACAM-MACAM DEMOKRASI BERDASARKAN FOKUS PERHATIANNYA

Macam demokrasi yang pertama adalah demokrasi berdasarkan pada fokus perhatiannya. Demokrasi jenis ini masih dibagi lagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. Demokrasi formal yang merupakan demokrasi yang sebatas berpusat pada bidang politik tanpa meminimalkan adanya suatu kesenjangan di dalam politik itu sendiri
2. Demokrasi material yang merupakan suatu demokrasi yang memiliki pusat pada bidang ekonomi tanpa adanya pengurangan pada sisi kesenjangan politik
3. Demokrasi gabungan yang merupakan suatu demokrasi yang menjadi kombinasi antara demokrasi formal dan juga demokrasi material

11. CIRI-CIRI DEMOKRASI

1. Tiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri.

2. Ada juga ciri konstitusional dimana berhubungan dengan kehendak kekuasaan ataupun kepentingan rakyat yang telah disusun dan juga dicatat di dalam undang-undang suatu Negara.
3. Memiliki ciri perwakilan dimana ketika mengelola sebuah kepentingan dalam Negara kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri.
4. Semua kegiatan atau aktivitas politik dilakukan dalam memilih pihak manakah yang akan diamanahi untuk melaksanakan roda pemerintahan. Adapun ciri kepartaian yakni partai sesungguhnya hanyalah sebuah media ataupun sebuah sarana sebagai unsur juga terapan dari sebuah sistem demokrasi itu sendiri.

12. PRINSIP DEMOKRASI

Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip penting di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa prinsip sistem demokrasi yang ada.

1. Adanya suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui serta disetujui oleh tiap warga Negara
2. Adanya keikutsertaan dari masing-masing warga Negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik
3. Adanya kesetaraan dan keadilan untuk tiap warga Negara.
4. Tiap warga Negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik

13. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DEMOKRASI

Demokrasi ternyata tidak hanya memiliki kelebihan serta keunggulan, namun juga kekurangan. Sehingga, setiap orang harus memahami apa saja keuntungan dan kekurangannya ketika sistem demokrasi diterapkan di sebuah Negara atau institusi tertentu.

Berikut ini adalah penjelasan terkait kelebihan dan kekurangan demokrasi yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

A. Kelebihan atau Keuntungan Sistem Demokrasi

1. Adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat diperkenankan atau boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik
2. Penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasar pada suara ataupun kehendak dari rakyat
3. Sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa.

B. Kekurangan atau Kelemahan Sistem Demokrasi

1. Kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan karena berbagai dampak yang sifatnya negatif seperti media yang tidak memiliki sikap objektif atau bahkan memiliki kecenderungan subjektif atas informasi atau berita tertentu
2. Berkaitan dengan kesamaan hak akan kerap dinilai tidak adil karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak bisa sama persis
3. Konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang sedang menjabat menjadi berkurang dikarenakan mendekati pemilihan umum yang akan datang

14. MEMBANGUN DEMOKRASI

Berkaitan dengan upaya untuk membangun demokrasi, Negara ini kebetulan sudah mengalami beberapa transisi dari yang namanya demokrasi semu di era Orde Baru menuju kepada paham demokrasi yang sesungguhnya. Pada beberapa dekade terakhir ini, Negara sudah mengalami berbagai kemajuan dalam bidang demokrasi.

Masing-masing dari pimpinan lembaga Negara menyepakati jika kunci sukses dalam pembangunan demokrasi adalah dengan menggunakan empat pilar kebangsaan berikut ini:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Bhineka Tunggal Ika

Hal tersebut tentu merupakan suatu pondasi yang dibangun dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan bagi Negara ini. Adanya empat pilar yang di cetuskan oleh pendiri Bangsa diharapkan mampu menjadikan setiap pimpinan di lembaga kenegaraan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi dan juga berupaya menyelesaikan masalah yang tengah dialami oleh bangsa ini.

Dan sebagai rakyat, tentu saja semuanya mengharapkan semua dapat berjalan dengan seimbang sehingga kondisi kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi sangat harmonis. Sebaik apapun peraturan yang ada apabila semua pihak enggan untuk mematuhi dan mentaati aturan tersebut, maka akhirnya juga tidak akan bisa sempurna.

Sebaliknya, peraturan yang sederhana akan tetapi dipatuhi oleh semua pihak yang ada, maka tentu saja kemanfaatan dan kemaslahatan akan terjalin. Negara ini benar-benar membutuhkan yang namanya pemerintahan bersih melalui berbagai pemahaman dan juga pelaksanaan atas nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah termaksud di dalam empat pilar kebangsaan.

Sehingga, adanya empat pilar itu sudah mencukupi jika segenap masyarakat dan juga jajaran pemerintahan bersedia untuk mempraktikkan hal itu secara baik dan tulus.

Dengan demikian, Indonesia tentunya di kemudian hari akan berhasil menjadi sebuah Negara yang besar dan mempunyai kedaulatan secara penuh.

Tentang mayoritas Negara modern saat ini dimana masing-masing rakyatnya memiliki satu kekuasaan untuk dapat berdaulat akan tetapi untuk kekuasaan politik sendiri tidak dijalankan secara langsung akan tetapi melalui DPR atau perwakilan, maka inilah yang pada akhirnya dikenal dengan demokrasi perwakilan.

Munculnya konsep demokrasi perwakilan itu sendiri berasal dari institusi berupa gagasan yang tumbuh di era renaissance atau pencerahan. Juga bersamaan dengan revolusi Prancis dan juga Amerika Serikat.